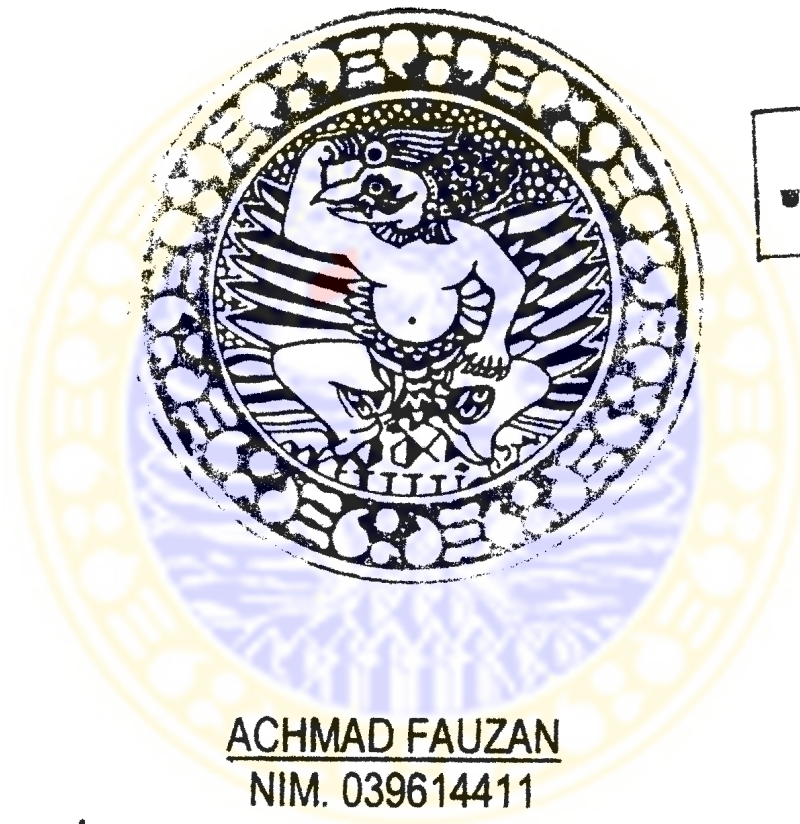


SKRIPSI

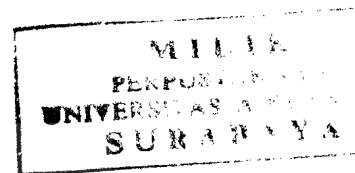
**PERJANJIAN PERWALIAMANATAN
ANTARA EMITEN DENGAN WALI AMANAT
DALAM PERDAGANGAN OBLIGASI**



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

**PERJANJIAN PERWALIAMANATAN
ANTARA EMITEN DENGAN WALI AMANAT
DALAM PERDAGANGAN OBLIGASI**

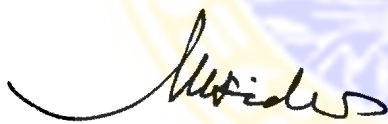


SKRIPSI

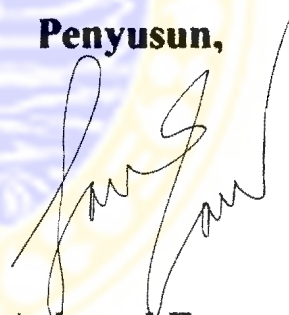
**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, belonging to Muchammad Zaidun.

Muchammad Zaidun, S.H.,M.Si.
NIP. 130 517 145

A handwritten signature in black ink, belonging to Achmad Fauzan.

Achmad Fauzan
NIM. 039614411

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

BAB V

KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan mengenai Perjanjian Perwaliamanatan sebagai berikut :

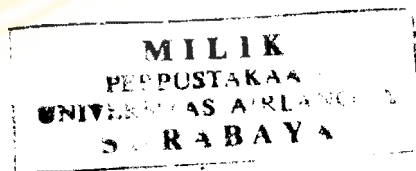
1. Proses penerbitan obligasi dimulai dengan adanya proses persiapan untuk mempersiapkan segala sesuatu tentang restrukturisasi dan pembenahan surat serta dokumen perusahaan. Kemudian dilakukan proses pendahuluan yang melibatkan pihak-pihak dalam pasar modal, dan terakhir proses pelaksanaan go public.
2. Perjanjian Perwaliamanatan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penerbitan obligasi. Perjanjian Perwaliamanatan dibuat oleh Emiten bersama Wali Amanat tanpa melibatkan pemegang obligasi (pihak investor). Hal ini karena pada saat perjanjian tersebut dibuat, obligasi belum dapat diterbitkan. Meskipun Perjanjian Perwaliamanatan dibuat tanpa melibatkan pemegang obligasi, justru hal ini untuk menjamin kepastian hukum terhadap efek bersifat hutang yang dibuat secara sepihak oleh Emiten.
3. Meskipun perjanjian perwaliamanatan dibuat tanpa melibatkan pihak pemegang efek bersifat utang sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1320 BW, perjanjian tersebut adalah sah, karena undang-undang menghendakinya.

Meskipun demikian, perjanjian tersebut harus dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal.

4. Perjanjian perwaliamanatan merupakan perikatan bersyarat, karena digantungkan terhadap suatu peristiwa yang akan datang dan belum tentu terjadi. Perikatan terjadi saat efek bersifat utang dialokasikan kepada pemegang efek atau pemodal. Hubungan hukum dalam perjanjian perwaliamanatan antara emiten dengan pemegang efek adalah hubungan pinjam-meminjam. Sedangkan antara emiten dengan wali amanat adalah hubungan perwaliamanatan. Hubungan antara pemegang efek dengan wali amanat adalah hubungan perwakilan karena ketentuan undang-undang.
5. Terhadap wanprestasi oleh Emiten dalam perjanjian perwalimanatan, maka wali amanat dapat meminta pertanggungjawaban emiten untuk melaksanakan prestasinya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Wali Amanat dapat dituntut ganti rugi oleh pemegang efek bersifat utang atas kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya, disamping juga dapat dilakukan penggantian dikemudian hari oleh karena sebab-sebab tertentu.

2. Saran

Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat oleh para Emiten bersama dengan Wali Amanatnya, belum tentu sama pengaturannya satu dengan yang lainnya, karena peraturan perundang-undangan hanya memuat hal yang pokoknya.



Agar pihak investor lebih mendapatkan kepastian akan haknya, maka sebaiknya ada peraturan khusus yang mengatur secara tegas tentang Lembaga Perwaliamanatan dan sebagainya.

